

**PERAN ANGGOTA PEREMPUAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SEBAGAI WUJUD
PARISIPASI WARGA NEGARA**

(Studi Deskriptif Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa
Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor)

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*



Disusun Oleh:

Naufal Muhamad Zahir

1804489

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2022**

PERAN ANGGOTA PEREMPUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SEBAGAI WUJUD
PARTISIPASI WARGA NEGARA

(Studi Deskriptif Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa Sukaraja,
Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor)

Oleh:

Naufal Muhamad Zahir

1804489

Sebuah Skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

© Naufal Muhamad Zahir

Universitas Pendidikan Indonesia

Juni 2022

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Skripsi ini tidak boleh diperbanyak, seluruhnya atau sebagian, **dengan dicetak
ulang, di photocopy, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PERAN ANGGOTA PEREMPUAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SEBAGAI WUJUD
PARTISIPASI WARGA NEGARA

NAUFAL MUHAMAD ZAHIR

NIM. 1804489

Disetujui dan disahkan pembimbing:

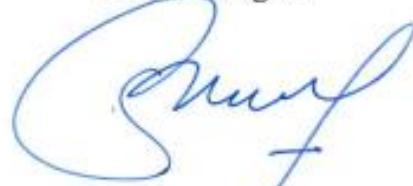
Pembimbing I



Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H., M.H., M.Si.

NIP. 19690929 199402 1 001

Pembimbing II



Sri Wahyuni Tanshil, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19870317 201404 2 002

Mengetahui

Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Dr. Susan Fitriasari, M.Pd

NIP. 19820730 200912 2 004

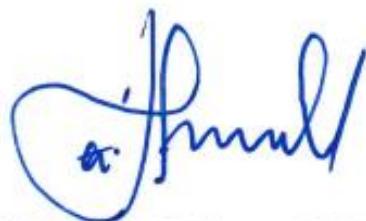
Skripsi ini telah diuji pada

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Agustus 2022

Tempat : Ruang Sidang Lantai 2 FPIPS

Panitia Ujian Terdiri dari

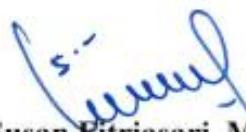
1. Ketua :



Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum.

NIP. 19660808 199103 1 002

2. Sekretaris :



Dr. Susan Fitriasari, M.Pd.

NIP. 19820730 200912 2 004

3. Penguji :

Penguji I,



Prof. Dr. H. Karim Suryadi, M.Si.

NIP. 19700814 199402 1 001

Penguji II,



Dr. Leni Anggraeni, M.Pd.

NIP. 19840222 200912 2 014

Penguji III,

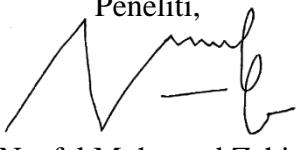


Dwi Iman Mathaqin, S.H., M.H.

NIP. 19861206 201504 1 001

PERNYATAAN TENTANG KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Perang Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa sebagai Wujud Partisipasi Warganegara” ini benar dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan Penjiplakan atau Pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Peneliti,

Naufal Muhamad Zahir

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PERAN ANGGOTA PEREMPUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SEBAGAI WUJUD PARISIPASI WARGA NEGARA.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada program studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, memberikan motivasi, dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini sehingga segala kendala dan kesulitan dapat teratas. Peneliti berharap segala kebaikan tersebut akan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya, dan peneliti khususnya, *Aamiin Allahuma Aamiin.*

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillaahirabbil 'alamin. Bersyukur kepada Allah *subhanahu wata'ala*, tidak mungkin skripsi ini rampung dikerjakan kecuali atas diberikannya kekuatan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. Puji syukur kehadirat-Nya memberikan penulis kelapangan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. *Laa hawla walaa quwwata illaa billaah.* Melalui bagian ini, peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh pihak yang telah membantu proses menyusun skripsi ini.

1. Untuk orang tua tercinta, mamah dan almarhum papah, Rini Mauludianti dan Herman Bestari yang telah dengan tulus membesarkan dan mendidik anaknya hingga bisa mendapatkan gelar sarjana. Allah senantiasa bersama mamah dan papah. Semoga senantiasa dilimpahkan keberkahan.
2. Kakak saya, Muhammad Zoelva Miraj telah mendukung adiknya dalam berbagai aspek sehingga mampu menyelesaikan studi dengan sangat berkecukupan, tak lupa adik saya Muhammad Tubba Al-Fathdry yang membantu saya menjaga mamah ketika saya merantau kuliah.
3. Bapak Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A. sebagai Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
4. Bapak Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum. sebagai Dekan FPIPS UPI yang telah memberikan izin penelitian skripsi dan menjadikan FPIPS sebagai zona nyaman dan tempat berjuang untuk berproses bagi saya pada masanya.
5. Ibu Dr. Susan Fitriasari, M.Pd. sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan yang telah memfasilitasi penulis untuk mengerjakan penelitian skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H., M.Si., M.H. sebagai pembimbing I dalam penyusunan skripsi. Terima kasih juga prof atas bimbingan prof selama ini, baik bimbingan ruhiyah maupun bimbingan akademik. Semoga prof dilimpahkan keberkahan.
7. Ibu Sri Wahyuni Tanshizil, S.Pd., M.Pd., sebagai pembimbing II yang telah membimbing sejak masuk sebagai mahasiswa baru di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan bimbingannya atas izin Allah swt. saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dan prestasi.

8. Ibu Dr. Leni Anggraeni, M.Pd. sebagai dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala bimbingan ibu.
9. Seluruh Dosen Program Studi Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat serta membentuk karakter diri bagi Penulis selama menjalani perkuliahan sampai saat ini.
10. Pak Dena Irawan, S.I.Kom selaku staf tata usaha Departemen Pendidikan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu dalam hal administrasi skripsi.
11. Badan Permusyawaratan Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor yang telah bersedia menjadi lokasi penelitian Skripsi terkhusus Ibu Siti Pa Yayat dan Pa Hendra.
12. Sahabat seperjuangan yang saya anggap seperti keluarga sendiri, Muhammad Irvan F.R., S.Pd., Muhammad Syahrul Romadoni, S.Pd, Abdillah Nazhif, S.Pd., Muhammad Royyan Mumtaz, S.Pd., Agung Nugraha Putra, S.Pd., Naufal Hidayah, S.Pd., Fajar S.M, S.Pd., Hari Nugraha Saputra, S.Pd. Semoga dilancarkan segala urusannya.
13. Teman-teman PKn angkatan 2018, khususnya kelas 2018 A yang sudah menemani masa-masa perkuliahan.
14. Rekan-rekan pengurus DPM HMCH 2019 yang mengajari saya kehidupan organisasi di kampus.
15. Rekan-rekan pengurus DPM HMCH Parlemen Reformasi 2020 terutama para pimpinan alat kelengkapan dewan, Andien Gustiningtyas, S.Pd., Dwi Gita Cahyanurani, S.Pd., Liesmaning Swasti, S.Pd., Sri Wahyuni, S.Pd., dan Hafidz Noor, S.Pd. yang telah membantu saya memimpin lembaga ini.
16. Kaka tingkat yang luar biasa memberikan bimbingan kepada saya, Kang Tarekh Febiana Putra, S.Pd., Mas Cahya Husta Handana., S.Pd., Kang Farent Bonatama Sagala, S.Pd., Kang Luqman A., S.E., Kang Fikrie Lazuardi, S.E., Teh Euis Cahyati, S.Pd., Teh Adhisty K., S.Kom., Teh Putri Sekar Melati, S.Pd. dan kakak tingkat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
17. Sahabat karib yang sudah saya anggap sebagai saudara sendiri, Yudha Wira Prayoga dan alm. Rizki Ramadhan yang banyak membantu saya mengatasi gagap teknologi dan teman diskusi segala macam topik.

Naufal Muhamad Zahir, 2022

**PERAN ANGGOTA PEREMPUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA SEBAGAI WUJUD PARTISIPASI WARGA NEGARA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

18. Adik tingkat yang selalu memberikan dukungan, Ghina Nur Ihsani, Nandang, Bangun, Fachrul Dena, Indah dan adik tingkat lainnya.
19. DPM REMA UPI Akselerator 2021, termasuk di dalamnya para pimpinan Rizal Maulana Yusuf, Rizky Ananda, Teh Salma K., Nurul Hidayah, Rahma A, L. Azizah F., Kang Abdullah, M Calvin, Teh Isma N.M., Farhan A, Eggy Herdiana, Teh Milla Hanifa, Rendy Hamdani, Kang Yaya, dan Nenden Kintani yang telah menemani dan mewarnai dunia organisasi kampus.
20. Badan Legislasi DPM Rema UPI 2021, Septiani Puspita, Herra, Ilma, Axmal, Yogi, Ismail, Widia, Hayya, Shafa, Dian, dan Rizki yang membantu mengembangkan amanah dengan baik
21. Rekan-rekan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Universitas Pendidikan Indonesia.
Semoga Allah merahmati segala aktivitas bapak/ibu dan teman-teman semua. Diberikan ketenangan dalam hatinya, dilapangkan segala aktivitasnya. Semangat meraih cita-cita kita termasuk menggapai Surga Allah sebagai cita-cita utama kita.
Aamiin.

ABSTRAK

NAUFAL MUHAMAD ZAHIR (1804489) PERAN ANGGOTA PEREMPUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SEBAGAI WUJUD PARTISIPASI WARGA NEGARA

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi peraturan perUndang-Undangan yang memberikan kesempatan pada kalangan perempuan di desa untuk memiliki tempat dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dengan salah satu tugasnya membentuk kebijakan pemerintah desa dalam peraturan desa. Perwakilan perempuan di sini merupakan bentuk nyata partisipasi warga negara dalam kegiatan politik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait sejauh mana peran anggota perempuan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa dan tanggapan masyarakat perempuan di desa terhadap perwakilannya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dengan narasumber yang dipilih secara purposive sampling dan teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, serta melakukan validitas data. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (a) Pada tahap perencanaan peraturan desa, anggota perempuan Badan Permusyawaratan Desa memiliki peranan menjembatani aspirasi masyarakat kalangan perempuan sebagai dasari inisiasi atau penyertaan ide dalam pembentukan peraturan desa. (b) Pada tahap pembahasan peraturan desa, anggota perempuan Badan Permusyawaratan Desa bertugas untuk memastikan rancangan peraturan desa yang dibahas tidak memiliki ketimpangan dalam hal kebijakan sehingga tidak merugikan masyarakat perempuan di desa. (c) Pada tahap pengundangan peraturan desa, anggota perempuan BPD berperan mencari umpan balik atas peraturan desa yang telah ditetapkan berupa masukan, kritik dan aspirasi dari masyarakat guna dijadikan bahan evaluasi. (d) Pandangan masyarakat perempuan yang diwakili tokoh perempuan di setiap dusun memiliki pesan positif terhadap perwakilan politik mereka, anggota perempuan Badan Permusyawaratan Desa dianggap memiliki peran aktif dalam menggali, menampung, dan mengelola aspirasi masyarakat perempuan. (e) Kendala yang dihadapi anggota perempuan dalam pelaksanaan peran pembentukan peraturan desa, dilihat dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi kendala adalah kapabilitas dan kemampuan finansial sedangkan faktor eksternal yang menjadi kendala adalah media penunjang dan rendahnya partisipasi masyarakat.

ABSTRACT

NAUFAL MUHAMAD ZAHIR (1804489) THE ROLE OF FEMALE MEMBERS OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY IN THE ESTABLISHMENT OF VILLAGE REGULATIONS AS A FORM OF CITIZEN PARTICIPATION

***Abstract:** This research is motivated by laws and regulations that provide opportunities for women in villages to have a place in the membership of the Village Consultative Body with one of their duties to form village government policies in village regulations. Female representation here is a tangible form of citizen participation in political activities. This study aims to provide an understanding of the extent of the role of female members of the Village Consultative Body in the formation of village regulations and the response of women communities in villages to their representatives. The data collection techniques carried out in this study were carried out by means of interviews, observations, documentation, with selected speakers by purposive sampling and data analysis techniques by means of data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification, and conducting data validity. From the results of this study, it was found that (a) At the planning stage of village regulations, female members of the Village Consultative Body have a role in bridging the aspirations of the community among women as the basis for initiation or inclusion of ideas in the formation of village regulations. (b) At the stage of discussion of village regulations, female members of the Village Consultative Body are tasked with ensuring that the draft village regulations discussed do not have inequality in terms of policies so as not to harm the women's community in the village. (c) At the stage of promulgating village regulations, female members of BPD play a role in seeking feedback on established village regulations in the form of input, criticism and aspirations from the community to be used as evaluation materials. (d) The view of the women's community represented by female leaders in each hamlet has a positive message towards their political representatives, female members of the Village Consultative Body are considered to have an active role in exploring, accommodating, and managing the aspirations of the women's community. (e) Obstacles faced by women members in the implementation of the role of village regulation formation, seen from two factors, namely internal and external factors. Internal factors that become obstacles are financial capabilities and capabilities while external factors that become obstacles are supporting media and low public participation.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	3
PERNYATAAN TENTANG KEASLIAN SKRIPSI.....	5
KATA PENGANTAR.....	6
UCAPAN TERIMAKASIH.....	7
ABSTRAK	10
ABSTRACT	11
DAFTAR ISI.....	12
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN TENTANG KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	18
1.1 Latar Belakang.....	18
1.2 Rumusan Masalah	22
1.3 Tujuan Penelitian.....	23
1.4 Manfaat Penelitian.....	23
1.4.1 Secara Teoritis	24
1.4.2 Secara Praktis	24
1.4.3 Segi Kebijakan.....	25
1.4.4 Segi Isu	25
1.5 Struktur Organisasi Skripsi.....	26
BAB 2 KAJIAN TEORI	28
2.1 Partisipasi Warga Negara (<i>Civics Engagement</i>).....	28
2.2 Perwakilan Politik	31
2.2.1 Pengertian Perwakilan Politik	31
2.2.2 Jenis-Jenis Perwakilan Politik	34

2.2.3	Faktor-faktor yang Mendorong Perwakilan Politik.....	37
2.3	Pemerintahan Desa	38
2.4	Badan Permusyawaratan Desa.....	41
2.3.1	Sejarah Badan Permusyawaratan Desa.....	41
2.3.2	Landasan Hukum Badan Permusyawaratan Desa	42
2.3.3	Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	44
2.5	Konsep Pengarusutamaan Gender	45
2.6	Landasan Perwakilan Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa 46	
2.7	Peraturan Desa.....	46
2.6.1	Konsep Peraturan Desa.....	46
2.6.2	Landasan Hukum Peraturan Desa.....	48
2.6.3	Jangkauan Arah Pengaturan Peraturan Desa	49
2.8	Penelitian Terdahulu.....	50
2.9	Kerangka Berpikir Penelitian	51
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	52	
3.1	Desain Penelitian	52
3.1.1	Pendekatan Penelitian.....	52
3.1.2	Metode Penelitian	52
3.2	Partisipan dan Lokasi Penelitian	53
3.1	Partisipan Penelitian	53
3.2	Partisipan Penelitian	55
3.3	Teknik Penelitian.....	56
3.1	Observasi	56
3.2	Wawancara	56
3.3	Studi Dokumentasi	57
3.4	Prosedur Penelitian	57
3.4.1	Tahap Pra-Penelitian.....	57
3.4.2	Tahap Pelaksanaan Penelitian	58
3.4.3	Tahap Pengolahan dan Analisis Data	59
3.5	Teknik Analisis Data	59
3.5.1	<i>Data Reduction</i> (Reduksi Data).....	59
3.5.2	<i>Data Display</i> (Penyajian Data).....	59
3.5.3	<i>Conclusion Drawing and Verification</i> (Penarikan Kesimpulan).....	59

3.6	Validitas Data	60
3.6.1	Triangulasi Data	60
3.6.2	Mengadakan <i>Member Check</i>	61
BAB 4 TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	62	
4.1.	Deskripsi Hasil Temuan Subjek Penelitian	62
4.1.1	Profil Badan Permusyawaratan Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.....	62
4.1.2	Program dan Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.....	66
4.1.3	Peraturan-peraturan di Lingkungan Desa Sukaraja	68
4.1.4	Program Desa bidang pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Perempuan	70
4.1.5	Subjek Penelitian	72
4.2.	Deskripsi Temuan Penelitian.....	73
4.2.1	Peranan Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa Sukaraja dalam pembentukan Peraturan Desa ditinjau dari beberapa tahapan	74
4.2.1.1	Peranan Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa Sukaraja dalam perencanaan Rancangan Peraturan Desa	74
4.2.1.2	Peranan Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa Sukaraja dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa	83
4.2.1.3	Peranan Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa Sukaraja dalam Pengundangan Peraturan Desa	91
4.2.2	Pandangan masyarakat perempuan Desa Sukaraja akan kehadiran perwakilan perempuan Badan Permusyawaratan Desa dan peranannya dalam pembentukan kebijakan Desa Sukaraja	97
4.2.3	Kendala dan Solusi dalam pelaksanaan peran Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa Sukaraja	103
4.3.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	108
4.3.1	Peranan Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa Sukaraja dalam pembentukan Peraturan Desa ditinjau dari beberapa tahapan	109
4.3.1.1	Peranan Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa Sukaraja dalam perencanaan Rancangan Peraturan Desa	110
4.3.1.2	Peranan Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa Sukaraja dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa	119
4.3.1.3	Peranan Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa Sukaraja dalam Pengundangan Peraturan Desa	129

4.3.2 Pandangan masyarakat perempuan Desa Sukaraja akan kehadiran perwakilan perempuan Badan Permusyawaratan Desa dan peranannya dalam pembentukan kebijakan Desa Sukaraja	136
4.3.3 Kendala dan solusi dalam pelaksanaan peran Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa Sukaraja	140
BAB 5 SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI.....	152
5.1. Simpulan.....	152
5.1.1 Simpulan Umum.....	152
5.1.2 Simpulan Khusus.....	154
5.2. Implikasi	156
5.3. Rekomendasi	158
5.3.1 Bagi Badan Permusyawaratan Desa	158
5.3.2 Bagi Masyarakat Desa	158
5.3.3 Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan	158
5.3.4 Bagi Peneliti Selanjutnya	159
DAFTAR PUSTAKA	160
DAFTAR TABEL	16
DAFTAR GAMBAR.....	17
DAFTAR PUSTAKA	18

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Peraturan-peraturan yang masih berlaku di Desa Sukaraja	69
Tabel 4. 2 Daftar himbauan dan maklumat dikeluarkan Desa Sukaraja.....	70
Tabel 4. 3 Partisipan dalam penelitian	73
Tabel 4. 4 Hasil Triangulasi Sumber Informasi Peran Anggota Perempuan dalam Tahap Perencanaan Peraturan Desa	77
Tabel 4. 5 Tabel 4.7 Hasil Triangulasi Sumber Informasi Peran Anggota Perempuan dalam Tahap Pembahasan Peraturan Desa	86
Tabel 4. 6 Hasil Triangulasi Sumber Informasi Peran Anggota Perempuan dalam Tahap Pengundangan Peraturan Desa.....	94
Tabel 4. 7 Hasil Triangulasi Teknik Pengumpulan Data mengenai Pandangan Tokoh Masyarakat akan Kehadiran Perwakilan Perempuan BPD	103
Tabel 4. 8 Pemahaman anggota perempuan BPD Sukaraja atas tahap perencanaan peraturan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri	112
Tabel 4. 9 Pemahaman anggota perempuan BPD Sukaraja atas tahap penyusunan peraturan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri	114
Tabel 4.10 Upaya anggota perempuan BPD Sukaraja dalam tahap pembahasan peraturan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri	122
Tabel 4.11 Indikator Pengambilan Keputusan Rancangan Peraturan Desa oleh Anggota Perempuan BPD Desa Sukaraja Sumber: diolah peneliti, 2022	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Implikasi Peraturan Desa ramah Gender	47
Gambar 2.2 Proses Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa	48
Gambar 2. 3 Kerangka Berpikir.....	51
Gambar 3.1 Subjek Penelitian.....	55
Gambar 3. 2 Triangulasi Sumber.....	60
Gambar 3. 3 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	61
Gambar 4 1 Struktur BPD Desa Sukaraja Periode 2018-2024.	64
Gambar 4 2 Wilayah Desa Sukaraja	65
Gambar 4 3 Alur Tahap Perencanaan Peraturan Desa.....	115
Gambar 4.4 Perencanaan Responsif Gender.....	118
Gambar 4.5 Alur Tahap Pembahasan Rancangan Peraturan Desa	120
Gambar 4.6 Integrasi Gender dalam Musyawarah Desa	128
Gambar 4.7 Alur Pengundangan Peraturan Desa	130
Gambar 4.8 Pola Umpam Balik Masyarakat atas Peraturan Desa.....	135
Gambar 4.9 Pola penyerapan aspirasi yang dilakukan anggota BPD	137

DAFTAR PUSTAKA

1. SUMBER BUKU

- Abdoelah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK (p. 132). Alfa Beta.
- Adrianus, T. P. (2019). *Mengenal Teori-teori Politik dari sistem politik sampai korupsi*. Nuansa Cendekia.
- Andersen, K., Ohme, J., Bjarnøe, C., Bordacconi, M. J., Albæk, E., & Vreese, C. de. (2021). *Generational Gaps in Political Media Use and Civic Engagement From Baby Boomers to Generation Z*. Routledge.
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Hukum Tata Negara. In *Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi* (II). Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Pengantar_Ilmu_Hukum_Tata_Negara_Jilid2.pdf.pdf
- Basrowi, S. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Bellino, M. . (2017). *Youth in Postwar Guatemala*. Rutgers University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.36019/9780813588025>
- Barrett, M., & Zani, B. (2015). *Political and Civic Engagement*. Routledge.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Danial, E., & Wasriah, N. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Danim, S. (2013). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. CV Pustaka Setia.
- Ezmir. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Rajawali Pers.
- Hardani, A., Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.)). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Napitupulu, P. (2005). *Peran dan Pertanggungjawaban DPR, Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta*. PT Alumni.
- Nasution, S. (2003). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara.
- O’Kane, C., Haj-Ahmad, J., & Fabio Friscia. (2020). ENGAGED AND HEARD! Guidelines on Adolescent Participation and Civic Engagement. In *Adolescent Development and Participation (ADAP) Section in UNICEF Headquarters*. United Nations Children ’s Fund. www.educationdevelopmenttrust.com
- Sanit, A. (1992). *Golput: Aneka Pandangan Fenomena Politik*. Pustaka Sinar Harapan.

- United Nations. (2007). *Civic Engagement in Public Policies: A Toolkit DESA*.
- Nurttjahjo, H. (2005). *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*. PT Raja Grafindo Persada.
- Pito, T. A., Efriza, & Fasyah, K. (2019). *Mengenal Teori-Teori Politik* (IV). Nuansa Cendikia Publishing.
- Ramlan, & Eka. (2021). *HUKUM PEMERINTAHAN DESA* (I). Enam Media.
- Samosir, O. (2021). *Sistem Perwakilan Politik Di Era Modern*. <http://repository.uki.ac.id/5450/1/SISTEMPERWAKILANPOLITIKDIERAMODERN.pdf>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Alfa Beta.

2. SUMBER JURNAL DAN PUBLIKASI ILMIAH

- Achmad, I. A. (2018). Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik. *Jurist-Diction*, 1(1), 164. <https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9734>
- Adeni, S., & Harahap, M. A. (2017). Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik. *Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi Dan Magister Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 1(2), 7.
- Arvanitidis, P. A. (2017). The concept and determinants of civic engagement. *Human Affairs*, 27(3), 252–272. <https://doi.org/10.1515/humaff-2017-0022>
- Asshiddiqqie, J. (2006). Pengantar Hukum Tata Negara. In *Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi* (II). Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Pengantar_Ilmu_Hukum_Tata_Negara_Jilid2.pdf.pdf
- Bestari, P., Sinaga, O., & Roespinoedji, D. (2019). Planning, implementation, and evaluation of policies in regional government as a student of essential material civic education. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(7), 149–158.
- Brady, H. E., Verba, S., & Schlozman, K. L. (1995). Beyond SES: A Resource Model of Political Participation. *American Political Science Review*, 89(2), 271–294. <https://doi.org/10.2307/2082425>
- Carbajal, J. (2018). Women and work: Ascending to leadership positions. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 28(1), 12–27. <https://doi.org/10.1080/10911359.2017.1387084>
- Celis, K. (2013). Representativity in times of diversity: The political representation of women. *Women's Studies International Forum*, 41, 179–186. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2013.07.007>
- Dahlum, S., Knutsen, C. H., & Mechkova, V. (2022). Women's political empowerment and economic growth. *World Development*, 156.

<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105822>

- Darmawan, C. (2015). Legislative strengthening and empowerment: Efforts to strengthen local governance and accountability through provincial parliaments in Indonesia. *American Journal of Applied Sciences*, 12(11), 802–809. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2015.802.809>
- Hardani, A., Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.)). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hariyanti, H., Darmawan, C., & Masyitoh, I. S. (2018). Peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 74–85. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.17659>
- Harjunen, O., Saarimaa, T., & Tukiainen, J. (2021). Political representation and effects of municipal mergers. In *Political Science Research and Methods* (Vol. 9, Issue 1). <https://doi.org/10.1017/psrm.2019.17>
- Kartika, A. W. (2019). URGENCY OF SOCIALIZATION REGULATION REGARDING ESTABLISHMENT OF VILLAGE REGULATIONS. *UNTAG Law Review (ULREV)*, 3(2), 178–187.
- Kartika, A. W., & Sutrisno. (2020). SOCIALIZATION URGENCY OF LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL. *UNTAG Law Review (ULREV)*, 4(1), 47–57.
- Kriyantono, R., Ida, R., Tawakkal, G. T. I., & Safitri, R. (2022). Not just about representative: When democracy needs females and their competency to run Indonesian government public relations to management level. *Helijon*, 8(1). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08714>
- Kumar, P. (2017). Participation of Women in Politics : Worldwide experience. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 22(12), 77–88. <https://doi.org/10.9790/0837-2212067788>
- Kusumawiranti, R. (2021). Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa. *Populika*, 9(1), 12–19. <https://doi.org/10.37631/populika.v9i1.348>
- Latif, A., & Cahyani, I. (2021). Inkonsistensi Pengaturan Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa. *Inicio Legis*, 2(2), 108–121. <https://doi.org/10.21107/il.v2i2.12675>
- Lloren, A. (2015). Women's Substantive Representation: Defending Feminist Interests or Women's Electoral Preferences? *Journal of Legislative Studies*, 21(2), 144–167. <https://doi.org/10.1080/13572334.2014.966643>
- Manuahe, F., Lapian, M., & Kairupan, J. (2017). PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEREMPUAN DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO. *Jurnal Eksekutif*, 2(2).

- Mendelberg, T., & Karpowitz, C. F. (2016). Women's authority in political decision-making groups. *Leadership Quarterly*, 27(3), 487–503.
<https://doi.org/10.1016/j.lequa.2015.11.005>
- Ngarsiningtyas, S. K., & Mustafa, W. S. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 61. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p61-84>
- O'Kane, C., Haj-Ahmad, J., & Fabio Friscia. (2020). ENGAGED AND HEARD! Guidelines on Adolescent Participation and Civic Engagement. In *Adolescent Development and Participation (ADAP) Section in UNICEF Headquarters*. United Nations Children 's Fund. www.educationdevelopmenttrust.com
- Pamuji, K. (2017). Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. *Jurnal Idea Hukum*, 3(1), 493–506.
<https://doi.org/10.20884/1.jih.2017.3.1.56>
- Priambudi, K. N. (2022). Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Desa. *Jurist-Diction*, 5(4), 1365–1380.
<https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37315>
- Prihatini, E. S. (2018). Indonesian young voters: Political knowledge and electing women into parliament. *Women's Studies International Forum*, 70(July 2018), 46–52. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.07.015>
- Prihatini, E. S. (2019). Women's views and experiences of accessing National Parliament: Evidence from Indonesia. *Women's Studies International Forum*, 74(March), 84–90. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2019.03.001>
- Prihatini, E. S. (2020). Women and social media during legislative elections in Indonesia. *Women's Studies International Forum*, 83(September), 102417.
<https://doi.org/10.1016/j.wsif.2020.102417>
- Purnomo, E. P. (2021). Relasi Perwakilan , Pemilihan dan Voting dalam Penyelenggaraan Demokrasi di Indonesia. *Journal of Government Insight*, 1(1), 25–37. <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>
- Putri, L. S. (2016). Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 161–175.
- Ramadhany, D., & Rahmawati, D. E. (2020). Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 39–62. <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.7237>
- Rosidin, U. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG ASPIRATIF. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(105), 169–183. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10>
- Sakti, L. (2016). Peraturan Desa Dari Perspektif Peraturan PerUndang-Undangan the Authority of Supervision and Regulation on. *Jurnal IUS*, IV(2), 166–178.
- Saud, M., Ida, R., Abbas, A., Ashfaq, A., & Ahmad, A. R. (2020). The Social

- Media and Digitalization of Political Participation in Youths: An Indonesian Perspective. *Society*, 8(1), 83–93. <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.160>
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158–170. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.158-170>
- Shair-Rosenfield, S. (2012). The alternative incumbency effect: Electing women legislators in Indonesia. *Electoral Studies*, 31(3), 576–587. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2012.05.002>
- Shim, J. (2021). Substantive representation of women and policy-vote trade-offs: does supporting women's issue bills decrease a legislator's chance of reelection? *Journal of Legislative Studies*, 0(0), 1–21. <https://doi.org/10.1080/13572334.2021.1902645>
- Soedarwo, V. S. D. (2014). Political Ideology Meaning and Patriarchal Ideology of Female Politicians in Indonesia: A Case in Malang. *Procedia Environmental Sciences*, 20, 486–495. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.061>
- Sukhoyya, A. W., Purwanti, A., & Wijaningsih, D. (2018). Pemilihan Wanita Dalam Badan Permusyawaratan Desa Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Perspektif Gender. *Diponegoro Law Journal*, 7, 72–82.
- Syahrin, M. A. (2020). *PERAN PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI PERWAKILAN*. 2(2), 146–165.
- Thamrin, D. (2017). Membuka Ruang Baru Demokrasi Partisipatif bagi Community Policing: Peran Forum Warga. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(1), 63–84. <https://doi.org/10.31599/jkn.v3i1.9>
- Wijayanto, D. E. (2014). KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA. *Jurnal Independent*, 2(1), 40–50.
- Wuisang, A. (2018). Reposisi Peraturan Desa Dalam Hierarki PerUndangan-Undangan. *Palar / Pakuan Law Review*, 4(1), 91–110. <https://doi.org/10.33751/palar.v4i1.785>
- Yuhandra, E. (2016). KEWENANGAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan). *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 61–76. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.410>

3. SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa
Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Tertib Badan
Permusyawaratan Desa.